



**KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG**

**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
2023**

**KECAMATAN WATANG  
SIDENRENG**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenaan Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. Rencana kerja, disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, diharapkan juga menyatukan persepsi, strategi seluruh aparat dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 menyajikan tentang latar belakang yang dilakukan di tahun 2023, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2023. Olehnya itu masukan yang sifatnya menyempurnakan sangat diharapkan.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga upaya kita mendapat Hidayah dan Ridho-nya. Aamiin.

Watang Sidenreng, 27 Juli 2023

Camat Watang Sidenreng



**HIDAYATULLAH ABBAS, S.STP.,M.Si**

NIP. 19810109 200012 1 001

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	3
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan capaian Renstra Kecamatan Watang Sidenreng .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Watang Sidenreng .....	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Watang Sidenreng .....	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	37
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	37
3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Propinsi .....	40
3.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten Sidenreng Rappang.....	42
3.4 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Watang Sidenreng .....	42
3.5 Program dan Kegiatan.....	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	47
4.1 Kerangka Pendanaan .....	47
BAB V PENUTUP .....	56

# BAB I P E N D A H U L U A N

## 1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran di atas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Watang Sidenreng mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Watang Sidenreng dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.



Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan setiap tahun. Perencanaan Kerja ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan mempertimbangkan usulan masyarakat. Perencanaan kerja tahunan menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakterhasilannya. Adapun cakupan perencanaan kerja tahunan meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renja Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Watang Sidenreng. Sejalan dengan itu, muatan Renja Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam RKA (rencana kerja anggaran) Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun anggaran.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang organisasi Perangkat Daerah Kecamatan serta Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah 2005-2025
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 -2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012, Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 09);
17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2023 dan Renstra Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 terutama yang terkait dengan Urusan Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Watang Sidenreng adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2023 serta sebagai penuntun di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Watang Sidenreng untuk jangka waktu satu tahun ke depan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Watang Sidenreng memuat :

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latarbelakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan Renja Kecamatan Watang Sidenreng tahun 2023.

Bab II merupakan bab yang memuat tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Watang Sidenreng untuk tahun 2023. Pada bab ini membahas tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Watang Sidenreng tahun lalu Capaian Renstra Kecamatan Watang Sidenreng, Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Watang Sidenreng, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Watang Sidenreng, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan musrenbang.

Bab III merupakan bab tentang Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. Pada Bab ini menjelaskan tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, telaahan terhadap kebijakan propinsi, tujuan dan sasaran renja Kecamatan Watang Sidenreng.

Bab IV merupakan bab tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah. pada bab ini menjelaskan tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Watang Sidenreng pada tahun 2023.

Bab V merupakan Penutup, pada bab ini menjelaskan tentang catatan yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.



**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Watang Sidenreng**

Capaian kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2019 beserta capaian Renstra Kantor Kecamatan Watang Sidenreng dengan bidang kewenangan administrasi untuk Pemerintahan serta misi meningkatkan kinerja pemerintah kota secara profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan dan sasaran misi meningkatkan sistem pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2021 yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA yang meliputi :
  1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang mencakup kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN telah mencapai realisasi kinerja sebesar 100 % dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2023 diperkirakan telah mencapai 80 %.
  2. Administrasi Umum Perangkat Daerah yang mencakup kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah tangga, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, telah mencapai realisasi kinerja sebesar 100 % dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2023 diperkirakan telah mencapai 80 %.
  3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mencakup kegiatan, Pengadaan Meubel, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya telah

mencapai tingkat realisasi target Renja 100% dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2023 diperkirakan telah mencapai 80 %.

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mencakup kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Perencanaan Pembangunan, dengan tingkat target Renja 0 % dari target sebesar 100% dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2023 diperkirakan telah mencapai 80 % .
  5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Meubel, Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya.
- II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Meliputi :
1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat mencakup kegiatan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan, Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Kewenangan yang dilimpahkan. telah mencapai realisasi kinerja sebesar 100 % dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2023 diperkirakan telah mencapai 80 %.
- III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYAAKAT DESA DAN KELURAHAN Meliputi :
1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa mencakup kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan. telah mencapai realisasi kinerja sebesar 100 % dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2023 diperkirakan telah mencapai 80 %.

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Mencakup kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan, Evaluasi kelurahan telah mencapai realisasi kinerja sebesar 100 % dan Capaian target Renstra (periode 2019-2023) sampai tahun 2023 diperkirakan telah mencapai 80 %.

#### IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA MELIPUTI :

1. Pasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa meliputi kegiatan Pasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaan Gunaan Aset Desa, Pasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Pungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2023 yang diuraikan di atas adalah evaluasi program dan kegiatan yang mana klasifikasi, kodefikasi dan nomenklaturnya didasarkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dampak yang timbul terhadap capaian program yang terdapat dalam Renstra Perangkat Daerah adalah :

1. Meningkatnya Keefektifan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi prima sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat
3. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi Muspika, Dinas Instansi, UPT Kepala Desa se Kecamatan Watang Sidenreng
4. Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Insrastruktur

Keberhasilan pembangunan di Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian integral dari keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan pepaduserasian,penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Kecamatan Watang Sidenreng dengan Rencana Pembangunan Kabupaten Sidrap. Penyelarasan dimaksud

antara lain dalam penetapan prioritas Renja Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi Kecamatan dan Desa.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2022 dijelaskan pada lampiran 1. Tabel TC.29.





**TABEL TC-29**  
**REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**KECAMATAN WATANG SIDENRENG SAMPAI DENGAN TAHUN 2022**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan 2019	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun 2021	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD 2019 s.d 2023		Cata tan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)	12
7.01	KECAMATAN										
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 Persen	0	0	0	0	100	0	100	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	0			0	100	100	100	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	- Urusan	-	-	-	-	-	-	-	

7.01.02. 2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5	Urusan	2	1	1	100	1	4	80	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>					<b>100</b>		<b>100</b>	
<b>7.01.03 .2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>					<b>100</b>		<b>100</b>	
7.01.03. 2.01	Peningkatan Partisiapasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15	Laporan	3	3	3	100	3	9	60	
7.01.03. 2.03	Peningkatan Epektivitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15	Laporan	3	3	3	100	3	9	60	
<b>7.01.03 .2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>					<b>100</b>		<b>100</b>	
7.01.03. 2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Paket	3	3	3	100	3	9	60	
7.01.03. 2.03	Pemberdayaan Masyarakat dikelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	210	Pokmas	35	40	40	100	42	117	56	

7.01.03. 2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	15	Kelurahan	3	3	3	100	3	9	60	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	
<b>7.01.06 .2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	
7.01.06. 2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25	Desa	5	5	5	100	5	15	60	
7.01.06. 2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	25	BPD	5	5	5	100	5	15	60	
	<b>X</b>											
	<b>XXX</b>											
<b>..01</b>	<b>XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>								
<b>..01.2.0 2</b>	<b>XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan administrasi keuangan</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>86</b>	<b>14</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	

..01.2.0 2.01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	Bulan	14	14	14	100	14	42	60	
<b>..01.2.0 6</b>	<b>XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi umum</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>9.222</b>	<b>17.978</b>	<b>9.428</b>		<b>9.594</b>	<b>28.244</b>	<b>28.244</b>	
..01.2.0 6.01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25	Buah	5	5	5	100	5	15	60	
..01.2.0 6.03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1321	Buah	111	111	111	100	111	333	25	
..01.2.0 6.08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	175	Kali	35	35	35	100	35	105	60	
..01.2.0 6.09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	850	Kali	150	170	170	100	170	490	58	
<b>..01.2.0 7</b>	<b>XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>								
..01.2.0 7.05	XXX Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	170	Unit/ Buah	45	40	40	100	34	119	70	
..01.2.0 7.06	XXX Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35	Unit/ Buah	5	5	5	100	5	15	43	
..01.2.0 7.10	XXX Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15	Unit/ Buah	5	3	3	100	3	11	73	



..01.2.0 7.11	XXX Pengadaan Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	Unit/ Buah	5	30	30	100	45	80	80	
<b>..01.2.0 8</b>	<b>XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>2.497</b>	<b>-</b>	<b>422</b>	<b>457</b>	<b>457</b>	<b>100</b>	<b>259</b>	<b>1.138</b>	<b>46</b>	
..01.2.0 8.01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.137	Lembar	350	385	385	100	187	922	43	
..01.2.0 8.02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	240	Bulan	48	48	48	100	48	144	60	
..01.2.0 8.03	XXX Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Bulan	12	12	12	100	12	36	60	
..01.2.0 8.04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Bulan	12	12	12	100	12	36	60	
<b>..01.2.0 9</b>	<b>XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>100</b>	<b>41</b>	<b>129</b>	<b>65</b>	
..01.2.0 9.01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50	Unit	12	12	12	100	10	34	68	

..01.2.0 9.02	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55	Unit	11	11	11	100	11	33	60	
..01.2.0 9.05	XXX Pemeliharaan Meubel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	35	Unit	6	5	5	100	7	18	51	
..01.2.0 9.06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	Unit	10	10	10	100	8	28	70	
..01.2.0 9.09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	Unit	4	7	7	100	5	16	80	



## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Watang Sidenreng**

Secara kelembagaan, Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dan melaksanakan tugas pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah di Kecamatan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watang Sidenreng diukur berdasarkan pencapaian terhadap target capaian indikator kinerja pada renstra. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Watang Sidenreng tahun 2022 yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai nilai 76 % dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 76 % dan,
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan untuk tahun 2022 belum ada program kegiatan.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Perangkat Daerah Kecamatan Watang Sidenreng sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Watang Sidenreng merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan Strategis Pemerintah.

Dalam pencapaian kinerja Kecamatan Watang Sidenreng, ditetapkan 2 (dua) indikator yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Tingkat Kepuasan Masyarakat.

Berdasarkan indikator di atas dirumuskan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Kecamatan Watang Sidenreng;
2. Tingkat Kepuasan Masyarakat dengan sasaran tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Analisis capaian kinerja pelayanan Kecamatan Watang Sidenreng dapat dilihat pada lampiran 2. Table TC-30.





**TABEL TC-30**  
**REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**KECAMATAN WATANG SIDENRENG SAMPAI DENGAN TAHUN 2022**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO.	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RESTRA OPD					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			74,58	76,33	77,14	78,32	80,80	74,58	78	78.25	80.80	
2.	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik			0	0	100	100	100	0	0	100	100	
3.	Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan			0	0	72	73	74	0	0	100	74	
4.	Persentase jumlah Desa/Kel yang dibina dan diawasi			0	0	100	100	100	0	0	100	100	

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Watang Sidenreng**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak dicarikan solusinya.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran Kecamatan Watang Sidenreng dalam lima tahun mendatang (2019-2023)

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhartikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Watang Sidenreng kepada Masyarakat. Analisis Isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Watang Sidenreng dalam memanjakan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam

mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;

- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- d) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

- e) Bencana non alam berupa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2021 berpotensi berlanjut hingga tahun 2022 sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan harus tetap mempertimbangkan upaya pencegahan penularan virus tersebut.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.**

Hal ini bertujuan untuk mereview kembali apakah usulan program dan kegiatan yang telah tertuang pada rancangan awal renja sudah sesuai dan sinkron dengan rancangan Awal RKPD karena dimungkinkan dalam penyusunan rancangan awal renja memungkinkan ada kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun tersebut maka kegiatan tersebut dapat diprogramkan/dimasukkan di dokumen rancangan RKPD dan selanjutnya dapat menjadi kegiatan pada periode RKPD. Setelah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan renja, maka dijelaskan bahwa Renja Kantor Kecamatan Kulo Tahun 2023 mengalami perubahan yang signifikan dikarenakan penyesuaian anggaran yang diberika oleh Bappelitbangda. Secara rinci review terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam tabel TC-31 yang menggambarkan tentang indicator kinerja, target kinerja yang terukur dan pagu indikatif masing-masing kegiatan serta hasil analisis kebutuhan setiap program dan kegiatan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja, pendanaan, dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Watang Sidenreng berdasarkan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah se Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Watang Sidenreng.



Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijelaskan pada lampiran 3.  
Tabel TC.31.



**Tabel TC-31**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS SKPD					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Watang Sidenreng	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 Persen	2.780.200	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Watang Sidenreng	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 Persen	2.780.200	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Watang Sidenreng	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	2.780.200	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Watang Sidenreng	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	2.780.200	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec. Watang Sidenreng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan	1.390.100	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec. Watang Sidenreng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan	1.390.100	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Watang Sidenreng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1.390.100	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Watang Sidenreng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1.390.100	

<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kec. Wata ng Siden reng</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>543.624.500</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kec. Wata ng Siden reng</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>543.624.500</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Kec. Wata ng Siden reng</b>	<b>Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>100 Persen</b>	<b>3.790.100</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Kec. Wata ng Siden reng</b>	<b>Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>100 Persen</b>	<b>3.790.100</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Kelurahan)	Kec. Wata ng Siden reng	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga	2.700.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Kelurahan)	Kec. Wata ng Siden reng	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga	2.700.000	
7.01.03.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Wata ng Siden reng	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1.090.100	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Wata ng Siden reng	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1.090.100	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kec. Wata ng Siden reng</b>	<b>Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>539.834.400</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kec. Wata ng Siden reng</b>	<b>Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>539.834.400</b>	
7.01.03.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	Kec. Wata ng Siden reng	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Paket	341.424.300	Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	Kec. Wata ng Siden reng	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Paket	341.424.300	

7.01.0 3.2.02 .03	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Kec. Watang Sidenreng	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas	197.220.000	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Kec. Watang Sidenreng	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas	197.220.000	
7.01.0 3.2.02 .04	Evaluasi Kelurahan	Kec. Watang Sidenreng	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 Laporan	1.190.100	Evaluasi Kelurahan	Kec. Watang Sidenreng	Jumlah Kelurahan yang Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 Laporan	1.190.100	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Kec. Watang Sidenreng</b>	<b>CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2.180.200</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Kec. Watang Sidenreng</b>	<b>CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2.180.200</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kec. Watang Sidenreng</b>	<b>Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2.180.200</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kec. Watang Sidenreng</b>	<b>Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2.180.200</b>	
7.01.0 6.2.01 .03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Watang Sidenreng	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen	1.290.100	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Watang Sidenreng	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen	1.290.100	
7.01.0 6.2.01 .07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Watang Sidenreng	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan	5 Dokumen	1.290.100	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Watang Sidenreng	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5 Dokumen	1.290.100	

			Desa								
..01	<b>XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kec. Watang Sidenreng	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2.929.332.100</b>	<b>XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kec. Watang Sidenreng	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2.929.332.100</b>	
..01.2.02	<b>XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kec. Watang Sidenreng	<b>Cakupan Layanan administrasi keuangan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2.354.821.600</b>	<b>XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kec. Watang Sidenreng	<b>Cakupan Layanan administrasi keuangan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2.354.821.600</b>	
..01.2.02.01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Watang Sidenreng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	2.354.821.600	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Watang Sidenreng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	2.354.821.600	
..01.2.06	<b>XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kec. Watang Sidenreng	<b>Cakupan Layanan Administrasi umum</b>	<b>100 Persen</b>	<b>114.493.400</b>	<b>XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kec. Watang Sidenreng	<b>Cakupan Layanan Administrasi umum</b>	<b>100 Persen</b>	<b>114.493.400</b>	
..01.2.06.01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Watang Sidenreng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	16.595.000	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Watang Sidenreng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	16.595.000	
..01.2.06.03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Watang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	65 Paket	11.721.400	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Watang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	65 Paket	11.721.400	

..01.2. 06.08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Watang Sidenreng	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	20 Laporan	13.155.000	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Watang Sidenreng	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	20 Laporan	13.155.000	
..01.2. 06.09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Watang Sidenreng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	73.022.000	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Watang Sidenreng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	73.022.000	
<b>..01.2. .07</b>	<b>XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Watang Sidenreng</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>141.100.400</b>	<b>XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Watang Sidenreng</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>141.100.400</b>	
..01.2. 07.05	XXX Pengadaan Peralatan Mebel	Kec. Watang Sidenreng	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	28.338.000	XXX Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec. Watang Sidenreng	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	28.338.000	
..01.2. 07.06	XXX Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec. Watang Sidenreng	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	54.904.100	XXX Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec. Watang Sidenreng	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	54.904.100	
..01.2. 07.10	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Watang Sidenreng	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	29.020.600	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Watang Sidenreng	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	29.020.600	



..01.2. 07.11	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Watanng Sidenreng	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	28.837.700	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Watanng Sidenreng	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	28.837.700	
<b>..01.2 .08</b>	<b>XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Watanng Sidenreng</b>	<b>Cakupan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>256.128.200</b>	<b>XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Watanng Sidenreng</b>	<b>Cakupan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>256.128.200</b>	
..01.2. 08.01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Watanng Sidenreng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	219 Lembar	2.212.500	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Watanng Sidenreng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	219 Lembar	2.212.500	
..01.2. 08.02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Watanng Sidenreng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	32.300.000	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Watanng Sidenreng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	32.300.000	
..01.2. 08.03	XXX Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Watanng Sidenreng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan	6.026.000	XXX Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Watanng Sidenreng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan	6.026.000	
..01.2. 08.04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Watanng Sidenreng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	215.589.700	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Watanng Sidenreng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	215.589.700	

..01.2 .09	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Kec. Wata ng Siden reng	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100 Persen	62.788.500	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Kec. Wata ng Siden reng	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100 Persen	62.788.500	
..01.2. 09.01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Wata ng Siden reng	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	17.222.000	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Wata ng Siden reng	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	17.222.000	
..01.2. 09.02	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Wata ng Siden reng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	21.433.000	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Wata ng Siden reng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	21.433.000	
..01.2. 09.05	XXX Pemeliharaan Mebel Kecamatan	Kec. Wata ng Siden reng	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	1.050.000	XXX Pemeliharaan Mebel Kecamatan	Kec. Wata ng Siden reng	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	1.050.000	
..01.2. 09.06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Wata ng Siden reng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	5.526.000	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Wata ng Siden reng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	5.526.000	
..01.2. 09.09	XXX Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Wata ng Siden reng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	17.557.500	XXX Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Wata ng Siden reng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	17.557.500	



## **2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat**

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Pada tahun 2022, telah dilaksanakan MUSRENBANG untuk pelaksanaan kegiatan 2023. Usulan tersebut akan dirumuskan oleh instansi teknis terkait yang dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah teknis untuk tahun 2023. Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditunjukkan kepada Dinas Perdagangan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan instansi terkait di Kabupaten Sidrap.

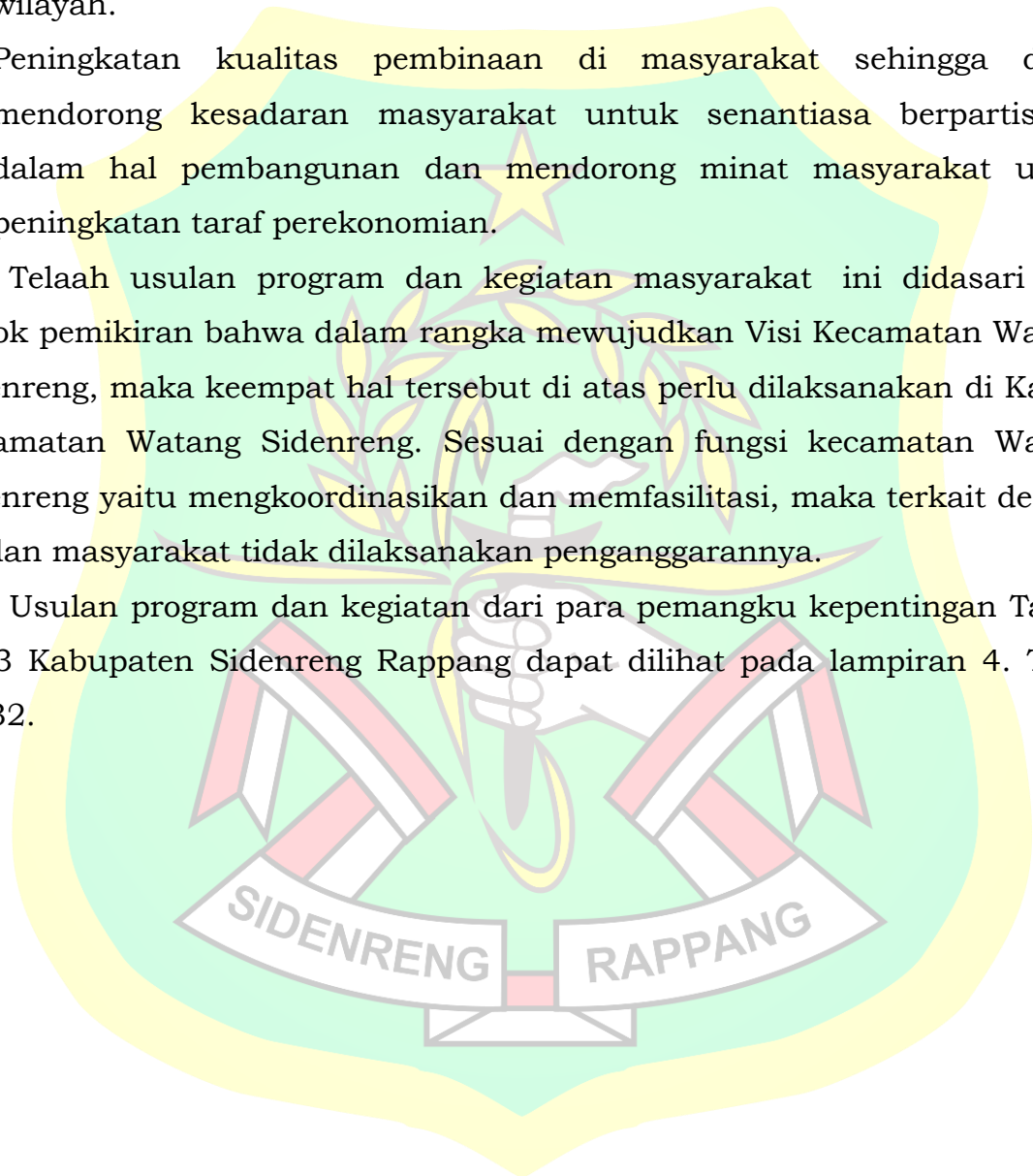
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Watang Sidenreng pada tahun 2022 yang terkait dengan usulan masyarakat tidak termasuk dalam wewenang kecamatan, sebagaimana kedudukan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparturnya melalui :

1. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;

2. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
3. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.
4. Peningkatan kualitas pembinaan di masyarakat sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk senantiasa berpartisipasi dalam hal pembangunan dan mendorong minat masyarakat untuk peningkatan taraf perekonomian.

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh Pokok pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kecamatan Watang Sidenreng, maka keempat hal tersebut di atas perlu dilaksanakan di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng. Sesuai dengan fungsi kecamatan Watang Sidenreng yaitu mengkoordinasikan dan memfasilitasi, maka terkait dengan usulan masyarakat tidak dilaksanakan penganggarannya.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada lampiran 4. Tabel TC.32.



**Tabel TC-32**  
**USULAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU**  
**KEPENTINGAN TAHUN 2023**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**KANTOR KECAMATAN**  
**WATANG SIDENRENG**

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) / kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting
	<b>JUMLAH</b>						





## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2022, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2022 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi system kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, bencana alam maupun bencana nonalam. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun penjelasan dari prioritas nasional adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19. Pelaksanaannya diantaranya melalui : menjalankan Program Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan, penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2023 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2023 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan health security; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi

penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2023 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui perluasan pusat-pusat Gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar tahun 2023 diarahkan untuk pemulihan pascapandemi Covid-19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Kebijakan untuk meningkatkan kualitas

lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana nonalam seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2023, diarahkan untuk : penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi penyakit); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK, dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.

7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (law and order). Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui: penguatan perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerjasama pembangunan internasional; penguatan sinergitas sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan; pemulihan kinerja pelayanan publik; serta peningkatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan pascapandemi Covid 19

### **3.2 Telaahan terhadap kebijakan Propinsi**

Prioritas tahun 2023 banyak dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Sulawesi selatan juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya



kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2023. Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2023 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan Tema Pembangunan Daerah Tahun 2023 yaitu **“Inovasi Pemanfaatan Potensi Dan Sumber Daya Alam Untuk Kebangkitan Ekonomi”**,

Strategi dan arah kebijakan pembangunan wilayah Propinsi Sulawesi Selatan merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan dan pariwisata, lumbung pangan nasional dengan mengarahkan pengembangan agroindustri dan agrobisnis pada komoditas unggulan Sulawesi Selatan yang didukung oleh pelayanan jaringan prasarana wilayah yang terjangkau dan berkualitas dengan memperhatikan daya dukung lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam RJMD Propinsi Sulawesi Selatan melalui pendekatan pembangunan wilayah berbasis pembangunan kawasan yang didasarkan pada arah kebijakan pembangunan Nasional dengan mengacu pada rencana tata ruang baik rencana tata ruang wilayah nasional.

Dalam upaya mengarahkan strategi pengembangan wilayah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka ditetapkan arah kebijakan pengembangan wilayah Sulawesi Selatan yang mengacu pada rencana tata ruang dan dijabarkan ke dalam lima kawasan pembangunan yaitu Kawasan Makassar, Kawasan Bulukumba, Kawasan Watampone, Kawasan Parepare, dan Kawasan Palopo.

Kabupaten Sidenreng Rappang adalah salah satu kabupaten di

Provinsi Sulawesi Selatan yang masuk kedalam pembangunan kawasan Parepare. Pembangunan kawasan Parepare dilakukan melalui pendekatan pusat pertumbuhan dengan mengembangkan komoditas unggulan pertanian, peternakan dan perikanan budidaya dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai lumbung pangan, oprimalisasi fungsi Kawasan Parepare sebagai pusat perdagangan dan jasa regional yang didukung hilirisasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan melalui pengembangan industri pengelolaan komoditas pertanian dan peternakan yang ditunjang oleh penguatan konektivitas antarmoda laut dan darat dan peningkatan kemantapan jalan provinsi.

### **3.3 Telaahan terhadap kebijakan Kabupaten Sidenreng Rappang**

Dalam mencapai sasaran pembangunan maka dirumuskan Arah Kebijakan pada tiap sasaran Pembangunan Pada Tahun 2023 sasaran Pembangunan Kabupaten Sidenreng untuk pemerintah kecamatan berada pada prioritas pembangunan kabupaten sidenreng rappang yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang amanatkan kepada pemerintah kecamatan, Pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang merumuskan strategi dan arah kebijakan. Adapun strategi tersebut adalah Meningkatkan kualitas SDM dalam pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan publik serta pengembangan inovasi daerah dengan arah kebijakan Penguatan BUMDes sebagai kelembagaan perekonomian desa dalam mendorong pertumbuhan serta menanggulangi kemiskinan berbasis produk unggulan desa.

### **3.4 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mana Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng berada Misi 5 yaitu Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance, yang ditetapkan pada Rencana Strategis, maka Kecamatan Watang Sidenreng



mempunyai beberapa tujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial.

Adapun Tujuan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kecamatan adalah **“Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan”**

Sasaran Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Watang Sidenreng menuju terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitas di Kecamatan Watang Sidenreng secara optimal. Adapun sasaran Kecamatan Watang Sidenreng adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum
- b. Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi
- c. Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas, maka indikator tujuan dan sasaran kecamatan Watang Sidenreng adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik
3. Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan
4. Persentase jumlah Desa yang dibina

### **3.5 Program dan Kegiatan**

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran membutuhkan penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dijalankan agar upaya pencapaian tujuan dan sasaran lebih terarah. Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi, kegiatan merupakan intermedit program yang menjadi penjabaran program sedangkan sub kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan oleh Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang direncanakan untuk satu periode pemerintahan yaitu lima tahun anggaran dan untuk perubahan renstra yang direncanakan mulai tahun 2022 maka rencana kinerja dan anggaran direncanakan untuk tahun 2022 sampai tahun 2023 sedangkan untuk tahun yang telah dilaksanakan yaitu tahun 2019,2020,2021 dan 2022. yang disajikan adalah data realisasi kinerja.

### **Program**

Perencanaan program terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

- a. Program pencapaian sasaran strategis
  1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis
  1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

### **Kegiatan**

Kegiatan adalah perwujudan dari program organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Berdasarkan program yang telah ditetapkan, maka kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pada program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik meliputi :

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat dengan sub: Kegiatan :
  - \* Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
  - \* Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
2. Kegiatan pada program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan meliputi :
  - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa :
    - \* Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (kelurahan)
    - \* Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
  - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan:
    - \* Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    - \* Pemberdayaan Masyarakat dikelurahan
    - \* Evaluasi Kelurahan
3. Kegiatan pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Meliputi :
  - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa :
    - \* Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
    - \* Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Sedangkan Program penunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Watang Sidenreng sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
  - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2023

Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2023 Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan Dokumen Tahunan yang berisi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang disusun dalam bentuk kerangka pendanaan dan sekaligus menjawab isu-isu strategis yang ada.

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Watang Sidenreng dijabarkan pada 5 (empat) program yang akan dilaksanakan di Tahun Anggaran 2022 dengan pendanaan sebesar **Rp. 3.477.917.000,-** adalah sebagai berikut :

- a. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public dengan rencana pendanaan **Rp. 2.780.200,-**
- b. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan rencana pendanaan **Rp. 543.624.500,-**
- c. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan rencana pendanaan **Rp. 1.180.200,-**
- d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan rencana pendanaan **Rp. 2.929.332.000**

Program tersebut di atas diuraikan ke dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan, hal ini dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, meliputi kegiatan
  1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan sub Kegiatan :
    - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan rencana pendanaan **Rp. 1.390.100,-**



- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan rencana pendanaan **Rp. . 1.390.100,-**
- b. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi kegiatan :
1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan :
    - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (kelurahan) dengan rencana pendanaan **Rp. 2.700.000,-**
    - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan rencana pendanaan **Rp. 1.090.100,-**
  2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan Sub Kegiatan :
    - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan rencana dana **Rp.341.424.300,-**
    - b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan rencana pendanaan **Rp.197.220.000,-**
    - c. Evaluasi Kelurahan dengan Rencana Dana **Rp. 1.190.100,-**
- c. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa meliputi kegiatan :
1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan rencana pendanaan **Rp. 1.090.100**
    - b.** Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dengan rencana pendanaan **Rp. 1.090.100,-**
- d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota meliputi kegiatan :
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan rencana pendanaan **Rp. 2.354.821.600,-**
  2. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan rencana pendanaan **Rp. 114.493.400,-**



3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rencana pendanaan **Rp. 141.100.400,-**
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rencana pendanaan **Rp. 256.128.200**
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rencana pendanaan **Rp. 62.788.500,-**

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 dan perkiraan maju Tahun 2024 untuk kecamatan Watang Sidenreng dapat dilihat pada lampiran 5. Tabel TC-33.



**Tabel TC-33**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2023**  
**DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**KANTOR KECAMATAN WATANG SIDENRENG**

Kode	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Lokasi	RENCANA TAHUN 2022			Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
				Target Capaian Kinerja	KEBUTUHA DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
7.01	KECAMATAN			100 Persen	3.477.917.000	DAU		100 Persen	3.512.696.100
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100 Persen	2.780.200	DAU		100 Persen	2.808.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100 Persen	2.780.200	DAU		100 Persen	2.808.000
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Prizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec. Watsid	3 Laporan	1.390.100	DAU		3 Laporan	1.404.000

7.01.02. 2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. watsid	12 Laporan	1390.100	DAU		12 Laporan	1.404.000
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Kec. Wat sid</b>	<b>100 Persen</b>	<b>543.624.500</b>	<b>DAU</b>		<b>100 Persen</b>	<b>549.060.700</b>
<b>7.01.03. 2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Kec. Wat sid</b>	<b>100 Persen</b>	<b>3.790.100</b>	<b>DAU</b>		<b>100 Persen</b>	<b>3.828.000</b>
7.01.03. 2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Kelurahan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Wata sid	3 Lembaga	2.700.000	DAU		3 Lembaga	2.727.000
7.01.03. 2.01.03	Penigkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wiayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Watsid	1 Laporan	1.090.100	DAU		1 Laporan	1.101.000
<b>7.01.03. 2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kec. Wat sid</b>	<b>100 Persen</b>	<b>539.834.400</b>	<b>DAU</b>		<b>100 Persen</b>	<b>545.232.700</b>
7.01.03. 2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kec. Watsid	6 Paket	341.424.300	DAU		6 Paket	344.838.500
7.01.03. 2.03	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Watsid	15 Pokmas	197.220.000	DAU		15 Pokmas	199.192.200

7.01.03. 2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kec. Wats id	3	Laporan	1.190.100	DAU	3	Laporan	1.202.000
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>2.180.200</b>	<b>DAU</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>2.202.000</b>
<b>7.01.06. 2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>2.180.200</b>	<b>DAU</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>2.202.000</b>
7.01.06. 2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Wats id	5	Dokumen	1.090.100	DAU	5	Dokumen	1.101.000
7.01.06. 2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Wats id	5	Dokumen	1.090.100	DAU	5	Dokumen	1.101.000
<b>..01</b>	<b>XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>2.929.332.100</b>	<b>DAU</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>2.958.625.400</b>
<b>..01.2.0 2</b>	<b>XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan administrasi keuangan</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>2.354.821.600</b>	<b>DAU</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>2.378.369.800</b>

..01.2.02.01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	umlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	2.354.821.600	DAU	14	Bulan	2.378.369.800
<b>..01.2.06</b>	<b>XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi umum</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>114.493.400</b>	<b>DAU</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>115.638.300</b>
..01.2.06.01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	5	Paket	16.595.000	DAU	5	Paket	16.760.950
..01.2.06.03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	65	Paket	11.721.400	DAU	65	Paket	11.838.600
..01.2.06.08	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20	Laporan	13.155.000	DAU	20	Laporan	13.286.550
..01.2.06.09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160	Laporan	73.022.000	DAU	160	Laporan	73.752.200
<b>..01.2.07</b>	<b>XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>141.100.400</b>	<b>DAU</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>142.511.400</b>
..01.2.07.05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Unit	28.338.000	DAU	4	Unit	28.621.400
..01.2.07.06	XXX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	54.904.100	DAU	5	Unit	55.453.100
..01.2.07.10	XXX Pengadaan Sara dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	29.020.600	DAU	3	Unit	29.310.800
..01.2.07.11	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	umlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung	4	Unit	28.837.700	DAU	4	Unit	29.126.100

		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Kantor yang Diadakan								
<b>..01.2.08</b>	<b>XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>256.128.200</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>248.689.500</b>
..01.2.08.01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	219	Laporan	2.212.500	DAU		219	Laporan	2.234.600
..01.2.08.02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	32.300.000	DAU		48	Laporan	32.623.000
..01.2.08.03	XXX Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	Laporan	6.026.000	DAU		15	Laporan	6.086.300
..01.2.08.04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	215.589.700	DAU		48	Laporan	217.745.600
<b>..01.2.09</b>	<b>XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>62.788.500</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>63.416.400</b>
..01.2.09.01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	Unit	17.222.000	DAU		8	Unit	17.394.200



..01.2.09. 02	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Prizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan Jenis Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Unit	21.433.000	DAU	2	Unit	21.647.300
..01.2.09. 05	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	Unit	1.050.000	DAU	2	Unit	1.060.500
..01.2.09. 06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	Unit	5.526.000	DAU	7	Unit	5.581.300
..01.2.09. 09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	17.557.500	DAU	5	Unit	17.733.100



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja Kecamatan Watang Sidenreng menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh perangkat Kecamatan Watang Sidenreng dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun kedepan. Camat Watang Sidenreng menjadi penanggungjawab atas implementasi, pengendalian, dan evaluasi seluruh program dan kegiatan di Kantor Kecamatan Watang Sidenreng dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Watang Sidenreng sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Watang Sidenreng merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Watang Sidenreng;
3. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Watang Sidenreng merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kecamatan Watang Sidenreng;
4. Kecamatan Watang Sidenreng berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja dengan Rencana Strategis Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2019-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023.

Watang Sidenreng, 27 Juli 2022  
CAMAT WATANG SIDENRENG



**HIDAYATULLAH ABBAS, S.STP,M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. 19810109 200012 1 001